

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Gambaran Umum Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah

2.1.1 Sejarah Singkat Perkembangan Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu (Jatengprov.go.id,2014). Sejak merdeka sampai dengan sekarang, Jawa Tengah telah berganti kepemimpinan Kepala Pemerintahan yaitu:

1. R. Pandji Soeroso, Tahun 1945;
2. KRT Mr Wongsonegoro, Tahun 1945 s/d 1949;
3. R. Boedijono, Tahun 1949 s/d 1954;
4. RMT. Mangunegoro, Tahun 1954 s/d 1958;
5. R. Soekardji Mangoen Koesoemo, Tahun 1958 s/d 1960;
6. RM Hadisoebeno Sosrowerdojo, Tahun 1958 s/d 1960;
7. Mochtar, Tahun 1960 s/d 1966;
8. Moenadi, Tahun 1966 s/d 1974;
9. Soepardjo Rustam, Tahun 1974 s/d 1983;
10. H.M. Ismail, Tahun 1983 s/d 1993;
11. H. Soewardi, Tahun 1993 s/d 1998;
12. H. Mardiyanto, Tahun 1998 s/d 2007;
13. Ali Mufiz, Tahun 2007 s/d 2008;
14. Bibit Waluyo, Tahun 2008 s/d 2013;
15. H. Ganjar Pranowo, Tahun 2013 – Sekarang.

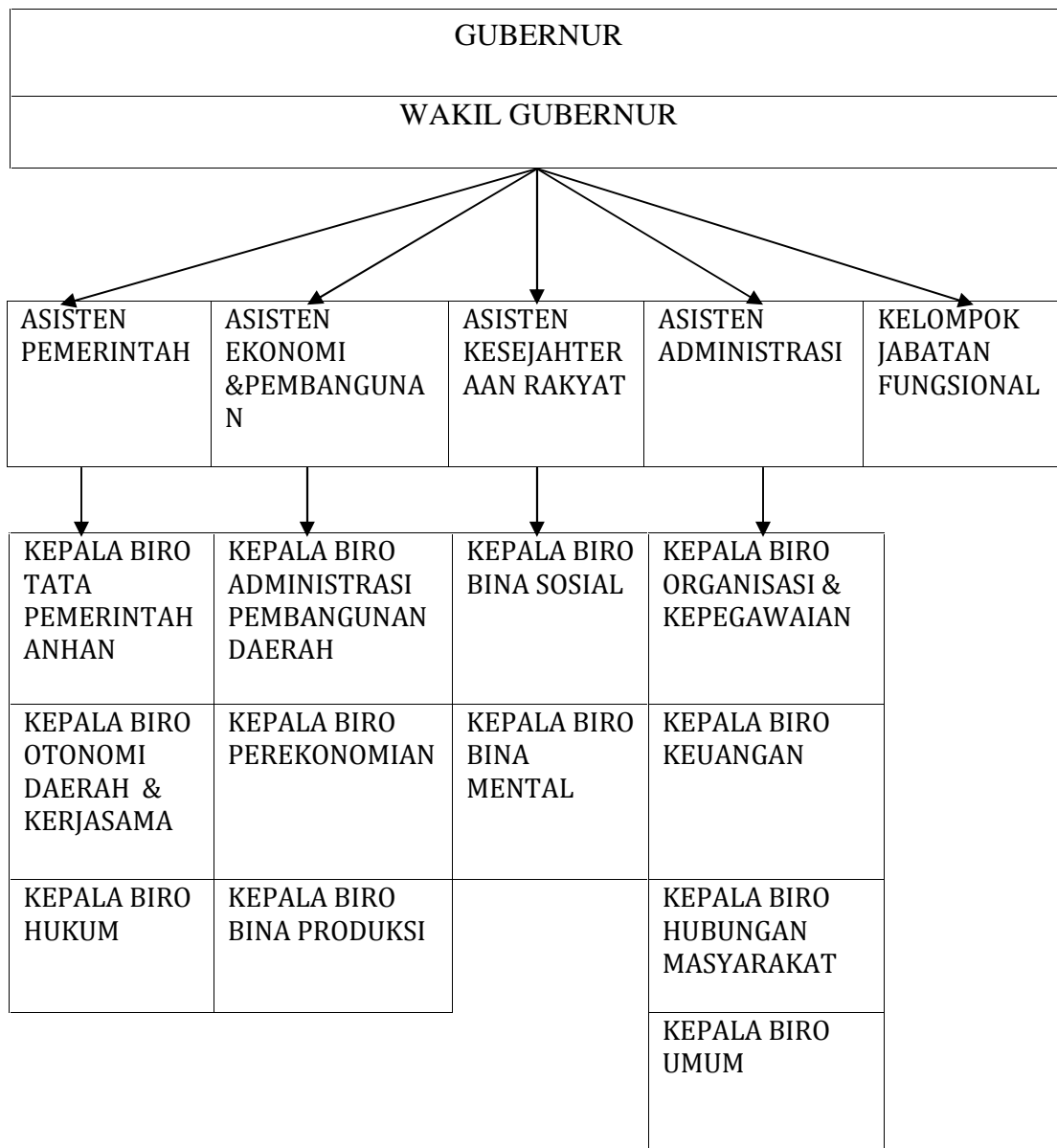
2.1.2 Visi dan Misi Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Visi dari pemerintahan Provinsi Jawa Tengah adalah menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari. *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi* yaitu

tidak korupsi, tidak bohong. Sedangkan misi untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
- Misi 2 : Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
- Misi 3 : Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” (tidak korupsi, tidak bohong)
- Misi 4 : Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.
- Misi 5 : Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
- Misi 6 : Meningkatkan kualitas pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
- Misi 7 : Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

2.1.3 Struktur Organisasi Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah



GAMBAR 2.1.3 Struktur Organisasi Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah

2.2 Gambaran Umum Biro Perekonomian

2.2.1 Visi dan Misi Biro Perekonomian

a. Visi:

TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN FASILITASI BIDANG PEREKONOMIAN UNTUK Mendukung PERWUJUDAN JAWA TENGAH YANG SEJAHTERA DAN BERDIKARI.

b. Misi:

- a) Mewujudkan tertib administrasi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah.
- b) Meningkatkan koordinasi pelaksana dan monitoring kegiatan pembangunan ekonomi Jawa Tengah.
- c) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah.
- d) Mengembangkan potensi sumber daya ekonomi di Jawa Tengah.
- e) Meningkatkan analisis, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan ekonomi di Jawa Tengah.
- f) Meningkatkan kualitas kinerja BUMD di Jawa Tengah.

2.2.2 Tugas Biro Perekonomian

Biro Perekonomian memiliki tugas pokok untuk menyusun perumusan kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi di bidang perindustrian dan perdagangan (PERINDAG), koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sarana perekonomian, pengembangan investasi dan badan usaha milik daerah (BUMD).

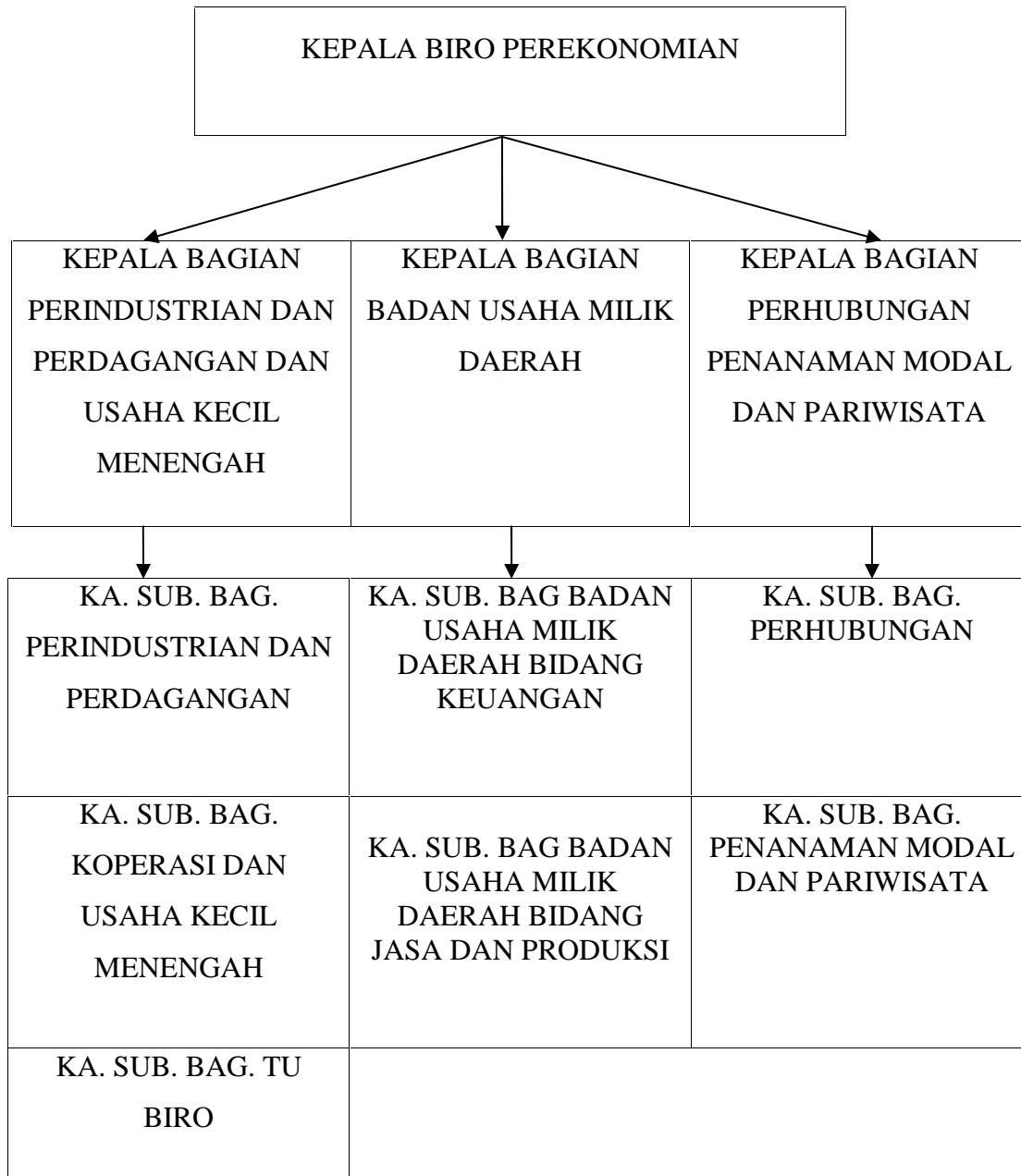
2.2.3 Fungsi Biro Perekonomian

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Biro Perekonomian memiliki fungsi:

1. Peremusan kebijakan pemerintahan daerah dibidang perekonomian.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian.
3. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perekonomian.
4. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang perekonomian dan pemberdayaan UMKM dan BUMD.
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dibidang perekonomian.

2.2.4 Struktur Organisasi Biro Perekonomian



GAMBAR 2.2.4 Struktur Organisasi Biro Perekonomian.